**REKONTRUKSI KURIKULUM KONFLIK
BERBASIS NILAI-NILAI MULTIKULTURAL PENDIDIKAN ISLAM
DAN KEARIFAN LOKAL**

Syaikhu Rozi
Doni Uji Widiatmoko

A B S T R A K

Konflik dan kekerasan antar para pelajar masih sering terjadi dan perlu dicarikan alternatif pemecahannya, di antaranya dengan cara menerapkan kurikulum konflik. Dalam penyusunannya, kurikulum konflik secara integratif mengambil nilai kearifan lokal dan nilai-nilai multikultural pendidikan Islam tersebut sebagai salah satu pedoman untuk membuat pembelajaran semakin efektif dan solutif terhadap kondisi kekinian, termasuk salah satunya adalah konflik-konflik horisontal. Dari segi bentuknya, kurikulum konflik akan dikembangkan dengan Pendekatan rekonstruksi sosial. Adapun langkah-langkah pengembangannya, akan dilaksanakan dengan menggunakan model terbalik Hilda Taba.

Kata Kunci : *Kurikulum Konflik, Multikultural Pendidikan Islam, Kearifan Lokal*

A. Pendahuluan

Konflik dan kekerasan di antara para pelajar masih sering terjadi, baik dalam bentuk perkelahian maupun tawuran. Di antara kasus-kasus konflik dan kekerasan pelajar adalah tawuran antara SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta yang terjadi pada hari Senin 24 September 2012 di ruas Jalan Bulungan Raya, Wilayah Jakarta Selatan. Kekerasan tersebut telah memakan korban, satu meninggal dunia akibat luka tusuk dan dua siswa lainnya mengalami luka berat.¹

Selang dua hari, tawuran kembali terjadi di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan yang melibatkan para pelajar dari SMA

¹www.news.liputan6.com

Yayasan Karya 66 (Yake) dan SMK Kartika Zeni. Dalam kejadian tersebut Deni Yanuar, siswa kelas XII SMA Yayasan Karya 66 (Yake) tewas dengan luka bacok di perut.

Di hari yang sama, tawuran pelajar pecah di Jalan Komodor, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Korbannya adalah Susilo (15) siswa kelas X SMK Mahardhika. Korban terluka parah terkena sabetan celurit dan harus dirawat di Rumah Sakit UKI, Cawang.² Bahkan, kasus-kasus kekerasan juga terjadi di antara para siswa yang masih duduk di bangku SD, seperti yang dialami Rivo Nofitra Ariska (12) Siswa SD di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yang meninggal dunia karena dipukuli teman sekelasnya.³

Kasus-kasus kekerasan yang telah diuraikan di atas sebenarnya hanya sebagian dari kasus-kasus kekerasan yang belakangan ini semakin marak terjadi di negeri ini, karena sejak beberapa tahun lalu telah banyak terjadi. Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa sampai dengan 1 november 2012, tercatat sedikitnya 16 pelajar tewas dari 86 kasus tawuran, sedangkan pada tahun 2011 yang lalu, jumlah peserta didik yang tewas sebanyak 39 orang dari 139 kasus. Selain kematian, tawuran yang dilakukan oleh para peserta didik juga mengakibatkan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan.⁴

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyebutkan bahwa setidaknya 84 persen siswa mengalami kekerasan di sekolah. Sebagai akibatnya, menurut Anies Baswedan, terhitung dalam enam tahun terakhir, sekitar 6.000 anak menjalani proses hukum akibat terlibat kasus kekerasan.⁵ Data statistik yang dikemukakan di atas tentu sangat memprihatinkan tidak hanya karena kasus itu justru dilakukan oleh mereka yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin

²www.tempo.com

³<http://daerah.sindonews.com>. Selasa, 13 Oktober 2015

⁴_____, "Tawuran Pelajar, Siapa yang Paling Bertanggung Jawab?". Media, Edisi November 2012.

⁵<http://news.okezone.com>. 25 Januari 2016.

negeri ini, tetapi juga semakin menegaskan banyaknya pelajar yang dapat disebut sebagai “*pelajar kriminal*” atau “*pelajar pembunuh*”.

Konflik di antara pelajar, seharusnya dapat dicegah, dikendalikan dan diselesaikan dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Sekecil apapun bentuk konflik, pasti berdampak negatif terhadap harmonisasi sosial.
2. Tidak jarang konflik antar pribadi dapat berkembang menjadi konflik antar kelompok/tawuran.
3. Bagi para pelajar, konflik yang terjadi di antara mereka dapat menjadi penghambat pencapaian cita-cita mereka di masa depan, terlebih jika konflik tersebut telah berkembang menjadi tindakan-tindakan kriminal seperti pembunuhan yang mengharuskan pelakunya menjalani proses hukum.
4. Konflik dapat menjadi budaya dan tradisi di antara pelajar.⁶

Salah satu upaya untuk dapat mencegah, mengendalikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan di antara para pelajar adalah dengan cara mengimplementasikan kurikulum konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kurikulum terencana untuk mengajarkan resolusi konflik seperti yang dilaksanakan di beberapa sekolah di Ontario, New York, California, Boston dan lain-lain menunjukkan hal yang menjanjikan, terjadi penurunan drastis dari jumlah anak-anak yang terlibat perkelahian, bahkan mereka lebih mampu mengelola konflik di antara mereka sendiri dan yang dialami teman-temannya dengan tanpa bantuan orang dewasa.⁷

Mengingat dalam tradisi pendidikan di Indonesia belum terdapat kurikulum yang secara spesifik dan terencana untuk mengajarkan resolusi konflik, maka penelitian dan kajian untuk dapat menyusun kurikulum

⁶Syaikh Rozi, *Membongkar Tradisi Kekerasan dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal ORASI UNIM, Volume 7 no 1 tahun 2013, hal 72.

⁷Barbara Woods, *Elementary Student Solving Problems The Peaceful Way*(Cortland: Standart , 1986) hal. 10

konflik perlu dilaksanakan. Sehubungan dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang relatif masih *ajeg* dalam menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan Islam dan kearifan lokal, maka kurikulum konflik yang ingin dirumuskan perlu dibangun berdasarkan nilai-nilai multikultural pendidikan Islam dan kearifan lokal.

Sehubungan dengan uraian tersebut, kontribusi yang akan diberikan dari hasil kajian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis adalah diperolehnya data dan informasi tentang nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam serta nilai-nilai kearifan lokal yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan kurikulum konflik, sebagai dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat materi dan pengalaman belajar, yang dapat memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka secara adil dan tanpa kekerasan.

Kontribusi praktis adalah diperolehnya rumusan kompetensi, materi, program dan strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan para guru untuk membantu peserta didik dalam menghindari, mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Dengan adanya kurikulum konflik tersebut diharapkan akan terjadi penurunan jumlah jumlah peserta didik yang terlibat konflik dan perilaku kekerasan lainnya.

B. Konsep Kurikulum Konflik

Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau harus dipelajari siswa.⁸ Pemahaman tersebut merupakan implikasi dari makna kurikulum itu sendiri yang pada mulanya didefinisikan sebagai "*A race course of subyek matters to mastered*", yang kemudian diadopsi dalam teori pendidikan menjadi "perlombaan untuk menguasai mata pelajaran" di sekolah atau

⁸Nana Syodih Sukamadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

lembaga pendidikan.⁹ Pandangan lain tentang kurikulum dikemukakan oleh Caswel dan Cambel, menurut mereka kurikulum adalah "...to be composed of all the experiences children have under the guidance of teacher",¹⁰ yaitu semua pengalaman anak dalam proses pendidikan, di mana dalam implementasinya pengalaman ini disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹¹ Dengan demikian, sebuah kurikulum memuat tujuan, materi serta strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam implementasinya, kurikulum memiliki tiga dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, pengalaman belajar, dan sebagai perencanaan pembelajaran.¹²

Berdasarkan pemahaman tentang kurikulum sebagaimana uraian di atas, maka yang dimaksud dengan kurikulum konflik adalah sebuah pendekatan kurikulum terencana untuk mengajarkan resolusi konflik kepada peserta didik.¹³ Sehubungan dengan komponen-komponennya, tujuan kurikulum konflik adalah untuk memberi peserta didik peluang berlatih yang terencana dan terkontrol untuk memperoleh ketrampilan menghindari konflik dan merasa bertanggung jawab untuk menggunakan resolusi konflik secara adil tanpa bantuan orang dewasa.

Materi dan bahan pembelajaran kurikulum konflik di antaranya tentang: 1) perkelahian dan kenapa perkelahian terjadi, 2) kekerasan fisik

⁹Muhammad Anwar (tt.), *Pengembangan Kurikulum dari Materi Pelajaran Kepengalaman Belajar*. Jurnal Ilmu Pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IPTK) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).

¹⁰Nana Syodih, *Op.Cid.*, hal. 4.

¹¹Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2003.

¹²Sariono, *Kurikulum 2013: Kurikulum Generasi Emas*. E-jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 3 Tahun 2014. Hlm. 1

¹³Bandingkan dengan Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik* (Bandung: Nusa Media, 2014), hal. 371

biasanya adalah cara bertengkar yang buruk, 3) konsekwensi-konsekwensi yang mungkin terjadi dari perkelahian, 4) alternatif lain selain memukul dan berkelahi, 5) kompromi biasanya adalah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan ketidak sepahaman daripada berkelahi. 6) dan lain-lain. Materi lain kurikulum konflik adalah pengajaran tentang konflik dilihat dari 1) apa masalahnya?, 2) apa penyebabnya?, 3) bagaimana penyelesaian masalah seperti itu di lain waktu?. Strategi-strategi untuk mengajarkan resolusi konflik adalah:

1. Menggunakan kurikulum resolusi konflik untuk mengajari siswa cara menemukan penyebab konflik dan cara-cara non kekerasan untuk menyelesaikannya.
2. Membimbing siswa untuk menguasai ketrampilan sosial tertentu yang berguna untuk menghindari dan menyelesaikan konflik.
3. Menggunakan rapat kelas untuk mendiskusikan penyebab konflik dan membangun nilai bahwa konflik harus diselesaikan dengan adil tanpa kekerasan.
4. Mengintervensi bila perlu untuk membantu siswa menggunakan ketrampilan resolusi konflik yang baru mereka pelajari.
5. Memberikan pelatihan khusus untuk siswa yang bersedia menjadi "pengelola konflik".
6. Memperkuat pengajaran di dalam kelas dengan menggunakan proses mediasi konflik.
7. Membantu siswa secara perlahan-lahan melangkah menuju tercapainya penyelesaian konflik tanpa mediasi pihak luar (orang dewasa).¹⁴

Penyusunan Kurikulum konflik dalam pendidikan di Indonesia belum banyak dilakukan, terlebih lagi bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah-sekolah formal. Namun, beberapa lembaga telah merumuskan di antaranya adalah *Working Group on Forest Land Tenure* (WG-Tenure) bersama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

¹⁴Ibid., hal. 381

Kehutanan (Pusdiklathut). Harapannya melalui kurikulum dan silabus ini dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan diklat mediasi konflik yang kemudian dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas para pihak dalam upaya resolusi konflik tenurial di Indonesia.¹⁵

Kurikulum pendidikan resolusi konflik juga pernah dikembangkan sembilan perguruan tinggi di Aceh dalam rangka penelitian yang akhirnya bertujuan untuk menjaga agar perdamaian di Aceh tetap abadi. Perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, IAIN Ar Ranirry Banda Aceh, Universitas Abulyatama Aceh Besar, Universitas Jabal Ghafur Pidie, Universitas Al Muslim Bireuen. Selain itu juga di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Universitas Gajah Puteh Aceh Tengah, Universitas Teuku Umar Meulaboh dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Cot Kala langsa. Targetnya adalah melahirkan kurikulum pendidikan resolusi konflik pada 2010 di perguruan tinggi di Aceh.¹⁶

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, didapatkan kesimpulan bahwa kurikulum konflik belum terumuskan secara spesifik dan jelas pada pendidikan di Indonesia, terutama di jenjang sekolah dasar dan menengah. Hal tersebut berbeda kondisinya dengan pendidikan di beberapa Negara maju. Di sekolah-sekolah yang terdapat di beberapa negara seperti Amerika, kurikulum konflik telah banyak dirumuskan dan dikembangkan secara spesifik dan jelas.

Adapun penelitian mengenai kurikulum resolusi konflik di antaranya dilakukan oleh Robert Enright, seorang psikolog dari Universitas Wisconsin yang berkolaborasi dengan beberapa guru terhadap para siswa kelas lima pada beberapa sekolah di Amerika. Tujuan riset tersebut adalah mengajarkan anak-anak untuk menjadi penyelesai masalah sosial, seperti konflik dan kekerasan. Hasilnya, anak-anak yang mengikuti program resolusi konflik terbukti lebih unggul secara

¹⁵<http://wg-tenure.org>. tanggal 25 september 2014

¹⁶<http://www.antaraneews.com>

signifikan dalam hal ukuran pemahaman interpersonal dan kemampuan penalaran keadilan.¹⁷

Thomas Lichona mencatat bahwa pelatihan untuk mencegah kekerasan yang diajarkan di Burke Hight School yang dikembangkan oleh Dr. Prothrow Stit dan dirancang untuk mengajari remaja tentang apa saja yang bisa menyebabkan konflik dan kekerasan serta bagaimana menghindarinya. Menurut Lichona, memang belum ada riset formal yang menyelidiki keefektifan program ini, namun beberapa indikator awal menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan, karena para siswa yang dulunya biasa pergi ke sekolah dengan membawa pisau untuk menjaga diri, kini sudah tidak ada lagi.¹⁸

Hasil catatan Lichona tersebut menegaskan hasil penelitian Barbara Woods yang menunjukkan bahwa pendekatan kurikulum terencana untuk mengajarkan resolusi konflik seperti yang dilaksanakan di beberapa sekolah di Ontario, New York, California, Boston dan lain-lain menunjukkan hal yang menjanjikan, terjadi penurunan drastis dari jumlah anak-anak yang terlibat perkelahian, bahkan mereka lebih mampu mengelola konflik di antara mereka sendiri dan yang dialami teman-temannya.¹⁹

C. Nilai-Nilai Multikultural Pendidikan Islam

Nilai-nilai multikultural sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam kehidupannya karena ia mengajarkan sikap demokratis, humanis, pluralis serta antidiskriminasi dalam lingkungannya.²⁰ Dalam perspektif pendidikan Islam, beberapa karakteristik pendidikan multikultural di antaranya: 1) belajar hidup dalam perbedaan, 2) membangun sikap saling percaya, 3) memelihara saling pengertian, 4) menjunjung sikap saling menghargai, 5)

¹⁷Robert D. Enright, *An Integration of Social Cognitive Development and Cognitive Processing* (American Educational Research Journal, 1980), hal. 17

¹⁸Thomas Lichona, *Op.Cit.*, hal. 383

¹⁹Barbara Woods, *Op.Cit.*, hal. 10

²⁰Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 17

terbuka dalam berpikir, 6) apresiasi dan interdependensi, 7) resolusi konflik dan rekonsiliasi nir-kekerasan.²¹

Nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi di antaranya sebagai berikut:

1. Pluralitas dan multikulturalitas merupakan *sunnatullah* yang mengandung nilai-nilai penting bagi pembangunan keimanan (QS. al-Rûm; 22).
2. Manusia diciptakan dalam keadaan yang plural dan multikultur tersebut agar mereka dapat saling *taffahum*, *ta'awun*, dan *tabayyun* sesama mereka (QS. Al-Hujurat [49]: 13).
3. Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbuat adil (QS. Al-Maidah: 8/HR. Muslim)
4. Hadis Nabi juga menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*) (HR. Abu Hurairah).

Secara historis, nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam telah diimplementasikan sejak Nabi Muhammad SAW. diutus menjadi Rasul melalui Piagam Madinah. Namun bila ditelusuri, konsep dasar pendidikan Islam multikultural telah ditemukan institusinya pada saat al-Ma'mun menjadi khalifah (813-833 M) dari dinasti Abbasiyah.²²

Nilai-nilai multikultural yang telah dikembangkan di Bayt Al-Hikmah di antaranya meliputi nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan, toleransi dan kesetaraan. Suasana demikian menurut Nurcholish Madjid merupakan interaksi positif antara orang muslim dan

²¹Zakiyuddin Baidhowy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 78 - 84

²²Lailial Muhtifah, "*Konsep Dasar Pendidikan Islam Multicultural Di Institusi Pendidikan Zaman Al-Ma'mun*", dalam Suwito dan Fauzan (eds.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 28.

nonmuslim,²³ yang merupakan nilai strategis dalam membangun dasar yang kuat dalam perdamaian.²⁴

Dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia yang pada satu sisi berpotensi menyebabkan konflik dan kekerasan serta mengingat kondisi peserta didik yang sering terlibat dalam berbagai bentuk konflik dan kekerasan seperti perkelahian, tawuran dan bahkan pembunuhan, maka nilai-nilai multikultural pendidikan Islam sudah seharusnya dapat terintegrasi secara praktis dalam kurikulum pendidikan. Namun agar muatan kurikulum pendidikan yang dimaksud lebih kontekstual dan aplikatif maka muatan kurikulum multikultural tersebut dapat dikembangkan bersama dengan kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi dan budaya masyarakat.

D. Nilai Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau "*local genius*" merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales.²⁵ Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku

²³Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 222

²⁴Achmad Ya'cub, *At-Tarbiyah Wa Azmatu Al-Tanmiyah Al-Basyariyyah* (Riyadh: Maktabul Tarbiyyah Al-Araby Li Daulah Lil Khalij, 2002), hlm. 200.

²⁵Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, (Ayatrohaedi, 1986), hal. 30

manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam gaib.²⁶

Kearifan lokal dapat berupa hasil karya cipta unik yang berbentuk fisik seperti, arsitektur, peralatan penunjang hidup dan lain lain, serta bentuk non fisik seperti filsafat, pemahaman agama, ideologi, ilmu pengetahuan, seni budaya, sistem ekonomi dan lain lain. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007). Jim Ife (2002) menyatakan bahwa kearifan lokal terdiri dari enam dimensi,²⁷ yaitu :

1. Pengetahuan lokal, yaitu yang terkait dengan lingkungan hidupnya.
2. Nilai lokal, yaitu nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya.
3. Keterampilan lokal, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten.
4. Sumber daya lokal, yang pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang dapat diperbarui.
5. Mekanisme pengambilan keputusan lokal, yaitu kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat.

Di antara enam dimensi tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan konflik adalah nilai lokal, yaitu nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai lokal yang terdapat di berbagai daerah di antaranya adalah nilai rukun masyarakat Jawa sebagaimana yang terdapat dalam *unen-unen "rukun agawe santosa, crah agawe bubrah"* yang berarti kerukunan menumbuhkan kekuatan, perpecahan menumbuhkan kerusakan.

²⁶A.S. Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 369

²⁷Jim Ife, *Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 469.

Nilai ini secara jelas menganjurkan untuk hidup rukun dan terintegrasi. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat Jawa memandang individu tidak terlalu penting dalam kedudukan sosial. Individu harus selalu berusaha mementingkan sosial yang lebih luas dan bukan pribadinya sendiri. Setiap pribadi dituntut sikap untuk tidak mengacaukan keseimbangan sosial demi ambisi atau kepentingannya pribadi. Selain itu juga dituntut "*nrimo*", dalam arti memiliki sikap-pasrah terhadap kekuatan yang lebih tinggi, menyadari bahwa hidupnya adalah bagian dari masyarakat luas.²⁸

Selain itu juga terdapat nilai hormat yang berkaitan erat dan mencakup relasi sosial yang membatasi masyarakat Jawa untuk bersikap tertentu kepada orang lain. Prinsip hormat berhubungan erat dengan masyarakat yang teratur secara hirarkis. Misalnya, hubungan antara orang tua-anak dan antar teman sebaya. Dalam masyarakat Jawa, hal tersebut telah terungkap jelas melalui bahasa yang mereka gunakan untuk menyebut atau berbicara dengan orang yang lebih tua.

Kearifan lokal bagian dari konstruksi budaya. Menurut Haba, kearifan lokal itu mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.²⁹ Kearifan lokal jika dipandang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik, memiliki enam aspek yang saling melengkapi, yaitu:

1. Sebagai penanda sebuah komunitas.
2. Elemen perekat (aspek kohesi) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan.
3. Kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat.

²⁸N. Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 27

²⁹Dikutip oleh Irwan Abdulah, dkk; (Ed). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 7-8.

4. Kearifan lokal memberikan warna kebersamaan dalam sebuah komunitas.
5. Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki.
6. Kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang mereduksi, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.³⁰

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di masyarakat, pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber-sumbernya. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa misalnya, dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

1. Nilai kearifan lokal melalui sikap hidup orang Jawa, contoh: *sepi ing pamrih, mikul dhuwur mendhem jero, mangan ora mangan angger kumpul, rukun agawe santosa, crah agawe bubrah, hamemayu hayuning bawana, golong gilig, sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh.*
2. Nilai kearifan lokal melalui tipologi Jawa, contoh: sikap gotong royong, saling menghormati, dan tenggang rasa, dan *tresna*.
3. Etos hidup orang Jawa, contoh: *nerima ing pandum*, menerima apa pun yang diberikan Tuhan kepada manusia.
4. Orang Jawa yang 'njawani', contoh: *unggah ungguh, toto krama, ewuh pakewuh'*
5. Nilai kearifan lokal melalui tokoh orang jawa, Ki Hajar Dewantara, contoh warisan ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni (1) tripantangan; (2)

³⁰Ibid., hal. 334-335.

trisentra pendidikan: (3) trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) *tringa*; (6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi kepemimpinan; dan (10) triN.³¹

6. Nilai kearifan lokal melalui pitutur luhur Jawa, contoh: *adigang, adigung, adiguna, aja ambek siya, aja cedhak kebo gupak, andhap asor, becik ketitik ala ketara, bisa njaring langit, catur budi, desa mawa cara negara mawa tata, edi peni adi luhung.*

E. Rekonstruksi Kurikulum Konflik Berbasis Nilai-Nilai Multikultural Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal

Nilai-nilai multikultural pendidikan Islam dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa pada dasarnya merupakan salah satu formula pemikiran yang memiliki maksud dan tujuan, di antaranya menuntun perilaku manusia untuk menuju kehidupan di masyarakat yang damai dan anti konflik. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk lingkungan masyarakat secara umum, dan juga lingkungan pendidikan secara khusus.

Dalam konteks signifikansi nilai-nilai multikultural pendidikan Islam dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa tersebut bagi dunia pendidikan, maka nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum konflik. Dalam penyusunannya, dokumen kurikulum tersebut secara integratif mengambil nilai kearifan lokal Jawa dan nilai-nilai multikultural pendidikan Islam tersebut sebagai salah satu pedoman untuk membuat pembelajaran semakin efektif dan solutif terhadap kondisi kekinian, termasuk salah satunya adalah konflik-konflik horisontal. Jadi, dalam konteks tersebut, kurikulum diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik secara sistematis dan praktis.

Dilihat dari segi bentuknya, kurikulum konflik yang akan direkonstruksi melalui penelitian ini akan dikembangkan dengan

³¹Boentarsono dkk, *Taman Siswa; Badan Perjuangan dan Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Taman Siswa Yogyakarta, 2012), hal. 19-20.

pendekatan rekonstruksi sosial, karena kurikulum ini nantinya akan bertolak dari problem yang dihadapi masyarakat (civitas akademik sekolah) untuk selanjutnya dicari upaya pemecahannya dengan menerapkan ilmu dan teknologi secara kooperatif dan kolaboratif, sehingga kurikulum yang tersusun selain menakankan isi pembelajaran yang terdiri atas problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata, juga proses pendidikan dan pengalaman belajar yang berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok dengan mengutamakan kerjasama antar peserta didik, guru maupun sumber belajar lain.³²

Adapun langkah-langkah pengembangannya, akan dilaksanakan dengan menggunakan model terbalik Hilda Taba, yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1) mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, penilaian, memperhatikan luas dalamnya bahan kemudian disusun unit suatu kurikulum, 2) mengadakan tryout, 3) mengadakan revisi atas dasar try out. 4) menyusun kerangka kerja teori, 5) mengemukakan adanya kurikulum baru yang akan diseminasikan.³³

Dalam penelitian ini, langkah-langkah pengembangan kurikulum yang menggunakan model terbalik Hilda Taba tersebut tidak akan diimplementasikan secara keseluruhan. Akan tetapi secara bertahap hanya untuk menyusun sebuah unit kurikulum yang didahului dengan proses mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, penilaian, dan strategi pembelajaran dengan memperhatikan luas dalamnya bahan. Pada masa yang akan datang, langkah-langkah pengembangan kurikulum yang lain sebagaimana yang terdapat model terbalik Hilda Taba tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara keseluruhan.

³²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 10

³³Dzakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Reineka Cipta, 2010), hlm. 56

Dengan kontruks kurikulum yang dikembangkan sebagaimana uraian di atas, maka harapan dapat membekali peserta didik memiliki ketrampilan dalam menghindari konflik serta merasa bertanggung jawab untuk menggunakan resolusi konflik secara adil dan efektif akan dapat terwujud secara maksimal.

F. Penutup

Sebagai bagian akhir yang menutup tulisan ini, maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali sebagai kesimpulan, yaitu bahwa tulisan ini hanya merupakan tawaran, sehingga masih perlu banyak pengkajian. Namun, seandainya konsep kurikulum secara final telah dapat disusun, maka agar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka revitalisasi kinerja pengelola pendidikan, pendidik dan peserta didik akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindarkan, terlebih lagi bagi seorang pendidik yang merupakan garda terdepan dalam implementasi kurikulum.

Strategi dan bentuk kurikulum yang direkomendasikan tulisan ini dapat dianggap sebagai sebuah inovasi, dan perlu disadari, bahwa inovasi tersebut belum banyak dilakukan oleh pengelola Pendidikan Tinggi karena adanya berbagai keterbatasan. Selain itu, tidaklah mudah mengubah kebiasaan lama kepada kebiasaan yang baru, terlebih lagi jika *mind set*-nya belum berubah, karenanya diperlukan waktu dan persiapan yang cukup, serta komitmen yang besar agar apa yang diinginkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah,Irwan, dkk; (Ed), 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Anwar, Muhammad (tt.), *Pengembangan Kurikulum dari Materi Pelajaran Kepengalaman Belajar*. Jurnal Ilmu Pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IPTK) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).
- Ayatrohaedi, 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidhowy, Zakiyuddin, 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Boentarsono dkk, 2012. *Taman Siswa; Badan Perjuangan dan Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Taman Siswa Yogyakarta.
- Enright, Robert D. 1980. *An Integration of Social Cognitive Development and Cognitive Processing*, American Educational Research Journal.
- <http://daerah.sindonews.com>. Selasa, 13 Oktober 2015
- <http://news.okezone.com>. 25 Januari 2016.
- <http://wg-tenure.org>. tanggal 25 september 2014
- <http://www.antaranews.com>
- Ife, Jim, 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, A.S., 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2003.
- Lickona, Thomas, 2014. *Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik*. Bandung: Nusa Media.
- Madjid, Nurcholish, 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Muhajir, Noeng, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi III*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- N. Mulder, 1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Sariono, *Kurikulum 2013: Kurikulum Generasi Emas*. E-jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 3 Tahun 2014.
- Sukamadinata, Nana Syodih, 2005. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwito dan Fauzan (eds), 2005. *Sejarah Social Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Woods, Barbara, 1986. *Elementary Student Solving Problems The Peaceful Way*. Cortland: Standart.
- www.news.liputan6.com

www.tempo.com

Ya'cub, Achmad, 2002. *At-Tarbiyah Wa Azmatu Al-Tanmiyah Al-Basyariyyah*. Riyadh: Maktabul Tarbiyyah Al-Araby Li Daulah Lil Khalij.

Yaqin, Ainul, 2005. *Pendidikan Multikultural; Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media

Zed, Mestika, 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.